

# **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESIAPAN PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL**

**Oleh:**

**Fadhillah Asri**

**Pembimbing : Yusraini dan Devi Safitri**

*Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia*

*e-mail : [fadhillahasrifebruari@gmail.com](mailto:fadhillahasrifebruari@gmail.com)*

*Factors Affecting The Readiness Of Implementation Of Accrual-Based  
Government Accounting Standards*

## **ABSTRACT**

The purpose of this research is to analyze factors affecting the readiness of implementation of accrual-based government accounting standards at working unit level. This study was motivated by the issuance of PP 71 of 2010 about Government Accounting Standards which will be implemented in 2015. This research is conducted on 26 working units in Pekanbaru by using questionnaires. Data used in this research was 47 data. The independent variables in this research are human resources, organizational commitment, and supporting devices. The dependent variable is the readiness of the implementation of accrual-based government accounting standards. Multiple linear regression analysis was applied to analyze the data. The statistical results indicate that factors affecting the readiness of application of accrual-based government accounting standards are human resource and supporting devices. While the organizational commitment, is not affecting the readiness of application of accrual-based government accounting standards.

*Keywords: readiness of implementation of accrual-based government accounting standards, human resources, organizational commitment, and supporting devices.*

## **PENDAHULUAN**

Agenda reformasi pengelolaan keuangan negara dimulai pada tahun 2001 saat pemerintah melaksanakan otonomi daerah secara efektif melalui UU No. 22/1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No.25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang kemudian direvisi menjadi UU No.32/2004 serta UU No.33/2004 tentang hal yang sama.

Reformasi pengelolaan keuangan negara tersebut kemudian berlanjut ketika pemerintah kembali melakukan perubahan yang fundamental pada bidang keuangan negara pada tahun 2003 dan ditandai dengan lahirnya paket undang-undang di bidang keuangan negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Ketiga paket undang-undang ini mendasari pengelolaan keuangan negara yang mengacu pada *international best practices*.

Setelah diterbitkannya undang-undang tersebut, selanjutnya bermunculan beberapa peraturan pemerintah yang pada intinya bertujuan untuk mewujudkan *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik), terutama yang berkaitan dengan masalah keuangan baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Dalam rangka menciptakan *good governance*, aspek akuntabilitas dan transparansi menjadi suatu hal yang wajib untuk dibenahi dan ditingkatkan. Salah satu upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah dengan melakukan pengembangan kebijakan akuntansi pemerintah berupa standar akuntansi pemerintahan (SAP) yang bertujuan untuk memberikan pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Sejak 22 Oktober 2010 pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 mengenai hal yang sama.

PP No. 71 Tahun 2010 adalah SAP berbasis akrual yaitu, menagaku pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengaku pendapatan, belanja, dan

pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Dengan ditetapkannya PP No. 71 Tahun 2010 maka penerapan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual telah memiliki kekuatan hukum.

Penerapan SAP Berbasis Akrual bukanlah merupakan hal yang mudah untuk dilaksanakan. Implementasi harus dilakukan secara hati-hati dengan perencanaan dan persiapan yang matang dan terstruktur terkait dengan peraturan, sistem, dan sumber daya manusia (SDM). Keberhasilan penerapan SAP Berbasis Akrual sangat diperlukan agar pemerintah mampu menghasilkan laporan keuangan yang lebih transparan dan lebih akuntabel. Untuk mencapai hal ini diperlukan faktor-faktor pendukung yang dapat memengaruhi kesuksesan tersebut dan kerja sama dari berbagai pihak.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kesiapan penerapan SAP berbasis akrual adalah kualitas sumber daya manusia (SDM). Adanya perbedaan antara SAP Berbasis Kas dan SAP Berbasis Akrual membuat peran sumber daya manusia menjadi vital. Ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia di bidang akuntansi pemerintahan tentunya sangat dibutuhkan oleh pemerintah. Namun Enho (2008), menyatakan bahwa “rata-rata pemerintah daerah belum dapat menyusun laporan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu PP No. 24 Tahun 2005 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)”. Hal ini tentunya menjadi tamparan keras bagi pemerintah karena ternyata SDM yang mereka miliki bahkan belum memahami SAP Berbasis Kas

apalagi untuk memahami SAP Berbasis Berbasis Akrua. Padahal Ardiansyah (2013) menyimpulkan SDM memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesiapan penerapan SAP Berbasis Akrua. Oleh karena itu pemerintah pusat dan daerah perlu secara serius menyusun perencanaan dan penempatan sumber daya manusia di bidang akuntansi pemerintahan antara lain melalui peningkatan MSDM yang profesional.

Faktor selanjutnya adalah Komitmen Organisasi, dalam hal ini adalah komitmen dari Pemerintah Daerah. Komitmen dari Pemerintah Daerah merupakan keinginan dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk melakukan perubahan sesuai dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan. Komitmen merupakan hal yang penting dalam penerapan suatu peraturan sebagaimana yang dinyatakan oleh Azhar (2007), "Komitmen dari anggota organisasi akan mempercepat keberhasilan penerapan peraturan tersebut. Selain itu, dukungan yang kuat dari pimpinan merupakan kunci keberhasilan dari suatu perubahan dari pemerintah (Sulani, 2010).

Faktor selanjutnya yang tidak kalah penting adalah perangkat pendukung teknologi informasi berupa *hardware* dan *software* yang memadai dalam pelaksanaan SAP berbasis akrua. Ketersediaan komputer (*hardware*) dan program-program akuntansi pemerintahan (*software*) akan sangat membantu SKPD dalam melaksanakan tugasnya dan dalam menerapkan SAP. Besarnya peran dari perangkat pendukung ini telah dibuktikan oleh Azhar (2007) dan Sulani (2010) dalam penelitiannya yang

menyatakan bahwa perangkat pendukung memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan penerapan suatu peraturan.

Penelitian ini mengacu pada tiga penelitian terdahulu, yaitu penelitian Azhar (2007), Aldiani (2010), dan Ardiansyah (2013). Azhar (2007) melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan Permendagri No.13 Tahun 2006. Sedangkan Aldiani (2010) melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan PP No.24 Tahun 2005 dan Ardiansyah (2013) melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan penerapan PP No.71 Tahun 2010.

Karena terdapat perbedaan yang cukup signifikan dalam metode pengukuran akuntansi dari basis kas ke basis akrua, peneliti ingin melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi persiapan penerapan SAP berbasis akrua. Diharapkan, dengan penelitian ini dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang harus diperhatikan oleh pemerintah dalam proses penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAP berbasis akrua. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam penelitian penelitian selanjutnya yang sejenis, khususnya yang berkaitan dengan penerapan SAP berbasis akrua di Indonesia.

## **TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **1. Hubungan Sumber Daya Manusia dan Kesiapan Penerapan SAP Berbasis Akrua**

Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting. Oleh

karena itu, harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Pemerintah telah mengeluarkan PP No.71 Tahun 2010 yaitu tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang akan diterapkan pada tahun 2015. Dalam rangka upayakesiapan dan pencapaian tujuan tersebut maka Pemerintah harus dapat mempersiapkan diri dalam hal membenahi sumber daya manusianya dengan cara memberikan sosialisasi, pendidikan, pelatihan, dan bimtek. Dengan begitu akan dihasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkompeten sehingga proses transisi menuju SAP Berbasis AkruaI bisa berjalan dengan lancar dan mulus serta juga akan dapat melaksanakan pembuatan laporan keuangan berdasarkan SAP Berbasis AkruaI dengan baik.

Penelitian tentang pengaruh sumber daya manusia pernah diteliti oleh Kusuma (2013) dan Ardiansyah (2013) yang menemukan adanya pengaruh positif dari sumber daya manusia terhadap kesiapan penerapan Standar Akuntansi Berbasis AkruaI.

H<sub>1</sub>: Sumber Daya Manusia Berpengaruh Terhadap Kesiapan Penerapan SAP Berbasis AkruaI

## **2. Hubungan Komitmen organisasi dan Kesiapan Penerapan SAP Berbasis AkruaI**

Komitmen organisasi merupakan dorongan dari dalam diri individu/keompok untuk melakukan sesuatu agar dapat menunjang keberhasilan organisasi sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan

lebih mengutamakan kepentingan organisasi dari pada kepentingan individu ataupun kelompok.

Pegawai pemerintahan yang memiliki komitmen tinggi akan bekerja dengan optimal dan maksimal karena mereka menginginkan kesuksesan organisasi dimana mereka bekerja. Pegawai pemerintahan yang berkomitmen tinggi tentunya akan mematuhi setiap peraturan atau perubahan yang terjadi dalam organisasi tempat mereka bekerja termasuk saat Pemerintah memutuskan akan menerapkan SAP Berbasis AkruaI setelah sebelumnya menggunakan SAP Berbasis Kas Menuju AkruaI. Mereka dengan sepenuh hati akan mempelajari, memahami atau menghayati penyusunan pelaporan keuangan sesuai dengan SAP.

Selain itu dengan adanya komitmen yang kuat, mereka juga akan bekerja dengan keras dan ikhlas dalam melaksanakan pekerjaannya yang nantinya akan berujung pada meningkatnya kinerja dan tercapainya tujuan organisasi. Dengan kuatnya komitmen yang dimiliki SKPD dan pegawai maka penerapan SAP Berbasis AkruaI akan berjalan lebih mudah.

Penelitian tentang pengaruh komitmen pernah diteliti oleh Azhar (2007), Sulani(2009) dan Ardiansyah (2013) yang menemukan bahwa adanya komitmen berpengaruh terhadap variabel dependen.

H<sub>2</sub>: Komitmen Organisasi Berpengaruh Terhadap Kesiapan Penerapan SAP Berbasis AkruaI

## **3. Hubungan Perangkat Pendukung dan Kesiapan Penerapan SAP Berbasis AkruaI**

Memasuki era modernisasi, pemerintah dan swasta mulai

menggunakan komputer dalam melakukan pekerjaannya. Hal ini tidak berlebihan karena dengan penggunaan komputer, efektifitas dan efisiensi kerja mengalami peningkatan. Pemerintah dalam melakukan pelaporan keuangan juga sudah menggunakan berbagai aplikasi program yang ditawarkan untuk mempermudah dalam membuat laporan keuangan dan dengan adanya ini, maka diyakini akan mempermudah SKPD dalam menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan SAP Berbasis Akrua. Ketersediaan *hardware* dan *software* juga akan membuat penerapan SAP Berbasis Akrua berjalan dengan sempurna karena didukung oleh perangkat pendukung yang layak dan memadai.

Penelitian tentang pengaruh perangkat pendukung pernah diteliti oleh Azhar (2007) mengenai pengaruhnya keberhasilan penerapan Permendagri 13 dan Sulani (2010) mengenai pengaruh perangkat pendukung terhadap keberhasilan penerapan mengenai pengaruh perangkat pendukung terhadap keberhasilan penerapan PP No.24 Tahun 2005 yang menemukan bahwa perangkat pendukung memiliki pengaruh yang signifikan.

H<sub>3</sub>: Perangkat Pendukung Berpengaruh Terhadap Kesiapan Penerapan SAP Berbasis Akrua.

## METODE PENELITIAN

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pegawai negeri sipil yang berada di lingkungan Pemerintahan Kota Pekanbaru. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu teknik penentuan

sampel dengan pertimbangan tertentu. Anggota populasi yang menjadi sampel adalah pegawai negeri sipil Kota Pekanbaru yang menjadi kepala dan staf sub bagian akuntansi/ penatausahaan keuangan SKPD Kota Pekanbaru.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah metode pengumpulan data primer yang diperoleh langsung dari sumber asli, dimana teknik pengumpulan data menggunakan instrument kuesioner.

Menurut Wiley (2002) dalam Azhar (2007), sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut. Adapun indikator pengukuran adalah (1) Penempatan Pegawai (2) Kompetensi dan kemampuan sumber daya manusia terhadap ilmu akuntansi dan teknologi (3) Pengembangan SDM. Instrumen pengukuran variabel ini menggunakan pertanyaan yang dikembangkan oleh Azhar (2007) dan Sulani (2009). Setiap responden diminta untuk menjawab 7 (tujuh) item pertanyaan menggunakan skala *Likert*.

Menurut Porter et.al. dalam Kusuma, (2013), komitmen adalah dukungan yang kuat dari pimpinan dan bawahan satuan kerja termasuk pimpinan SKPD penerima dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan. Komitmen juga bisa diartikan sebagai keinginan/kemauan yang kuat dari berbagai pihak yang ada diorganisasi untuk menerapkan suatu kebijakan atau peraturan. Instrumen pengukuran variabel ini menggunakan pertanyaan yang dikembangkan oleh Azhar (2007) dan Sulani (2009). Setiap responden diminta untuk menjawab 6 (enam)

item pertanyaan menggunakan skala *Likert*. Indikator pengukuran adalah (1) Komitmen SKPD dalam penyelesaian laporan keuangan (2) Komitmen dalam menerapkan SAP Berbasis Akrua

Perangkat pendukung adalah seperangkat alat-alat tambahan yang digunakan untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Perangkat pendukung berfungsi untuk memudahkan dan membantu seseorang, kelompok, ataupun organisasi dalam melakukan pekerjaan dan mencapai tujuan. Instrumen pengukuran variabel ini menggunakan pertanyaan yang dikembangkan oleh Azhar (2007) dan Sulani (2009). Setiap responden diminta untuk menjawab 6 (enam) item pertanyaan menggunakan skala *likert*. Indikator pengukuran variabel adalah (1) Ketersediaan perangkat pendukung (2) Tingkat modernitas perangkat pendukung (3) Persepsi pegawai tentang keberadaan perangkat pendukung dalam membantu pekerjaan mereka (4) Pelatihan yang diberikan.

KSAP (2010) mendefinisikan kesiapan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual sebagai kegiatan atau hal hal yang akan dipersiapkan pemerintah dalam rangka mengimplementasikan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua yang tentunya sesuai dengan roadmap yang telah ditetapkan. Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen yang dikeluarkan oleh KSAP (2010). Variabel ini diukur dengan diukur dengan menggunakan skala likert (Likert scale) yang berkaitan dengan 4 (empat) item pertanyaan. Indikator pengukurandiindikasikan dengan (1) Sosialisasi (2) Pengembangan sistem akuntansi dan TI (3) Pengembangan SDM dan (4) Ketersediaan

Dalam penelitian ini, hipotesis diuji dengan menggunakan model regresi linier berganda. Analisis regresi berganda digunakan oleh peneliti, bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya) (Sugiyono, 2012:277).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Deskriptif Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan satu tahap, yaitu dengan cara memberikan sebanyak 52 (lima puluh dua) kuesioner kepada responden meliputi 26 SKPD di lingkungan pemerintah Kota Pekanbaru, yang terdiri dari 10 Badan, 15 Dinas, dan 1 Kantor. Kemudian sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, kuesioner dijemput kembali. Dari 52 (lima puluh dua) kuesioner yang dikirim/dibagikan yang memenuhi syarat sebanyak 47 (empat puluh tujuh).

### 2. Hasil Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sumber Daya Manusia (X <sub>1</sub> )	47	22	33	29,26	2,989
Komitmen (X <sub>2</sub> )	47	21	29	25,06	2,004
Perangkat Pendukung (X <sub>3</sub> )	47	19	29	24,57	2,644
Kesiapan Penerapan	47	11	20	15,85	2,021

pan SAP Berbas is Akrual (Y)					
Valid N (listwi se)	47				

Berdasarkan pengujian statistik diatas, dapat diketahui bahwa variabel sumber daya manusia memiliki jumlah sampel (N) sebanyak 47, dengan nilai minimum 22, nilai maksimum 33, mean 29,26 dan standart deviation (simpangan baku) 2,989. Variabel komitmen organisasi nilai minimum 21, nilai maksimum 29, mean 25,06 dan standart deviation (simpangan baku) 2,004. Variabel perangkat pendukung dengan nilai minimum 19, nilai maksimum 29, mean 24,57 dan standart deviation (simpangan baku) 2,644. Variabel kesiapan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dengan nilai minimum 11, nilai maksimum 20, mean 15,85 dan standart deviation (simpangan baku) 2,021.

### 3. Analisis Data

#### 3.1. Hasil Uji Validitas Data

Pengujian validitas instrumen dengan menggunakan software SPSS, nilai validitas dapat dilihat pada kolom *Corrected Item-Total Correlation*. Jika angka korelasi yang diperoleh lebih besar dari pada angka kritik ( $r_{hitung} > r_{tabel}$ ) maka instrumen tersebut dikatakan valid. Dimana nilai  $r_{tabel}$  untuk sampel sebanyak 47 adalah 0,2876.

Variabel	Pertanyaan	$r_{hitung}$	$r_{tabel}$	Ket
Sumber daya	1	0,707	0,2876	Valid

Manusia				
	2	0,644	0,2876	Valid
	3	0,729	0,2876	Valid
	4	0,502	0,2876	Valid
	5	0,503	0,2876	Valid
	6	0,459	0,2876	Valid
	7	0,440	0,2876	Valid
Komitmen Organisasi	1	0,566	0,2876	Valid
	2	0,586	0,2876	Valid
	3	0,550	0,2876	Valid
	4	0,666	0,2876	Valid
	5	0,611	0,2876	Valid
	6	0,715	0,2876	Valid
Perangkat Pendukung	1	0,325	0,2876	Valid
	2	0,741	0,2876	Valid
	3	0,819	0,2876	Valid
	4	0,706	0,2876	Valid
	5	0,609	0,2876	Valid
	6	0,663	0,2876	Valid
Kesiapan Penerapan SAP Berbasis Akrual	1	0,729	0,2876	Valid
	2	0,727	0,2876	Valid
	3	0,663	0,2876	Valid
	4	0,641	0,2876	Valid

Berdasarkan hasil uji validitas untuk variabel SDM, Komitmen Organisasi, Perangkat Pendukung dan Kesiapan Penerapan SAP Berbasis Akrual dapat disimpulkan bahwa seluruh item pertanyaan dinyatakan valid, Hal ini dapat dilihat bahwa  $r_{hitung}$  variabel SDM, Komitmen Organisasi, Perangkat Pendukung dan Kesiapan Penerapan SAP Berbasis Akrual lebih tinggi dari nilai  $r_{tabel}$ .

#### 3.2. Hasil Uji Reliabilitas

Setelah dilakukan uji validitas, langkah selanjutnya adalah melakukan uji reliabilitas data yaitu

dengan melihat nilai cronbach's alpha. Jika nilai Cronbach's alpha lebih besar dari 0.6 maka kuesioner penelitian tersebut dinyatakan reliabel. Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka hasil pengujian reliabilitas dapat ditunjukkan sebagai berikut:

Variabel	Cronbach Alpha	Batas Reliabilitas	Ket
Sumber daya Manusia	0,663	0,6	Reliabilitas
Komitmen Organisasi	0,667	0,6	Reliabilitas
Perangkat Pendukung	0,713	0,6	Reliabilitas
Kesiapan Penerapan SAP Berbasis Akrua	0,629	0,6	Reliabilitas

Hasil pengujian data menunjukkan bahwa nilai cronbach's alpha lebih besar dari 0,6. Hal ini menunjukkan bahwa data penelitian dinyatakan reliabel. Menurut Nunnally dalam Sulani (2010) Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,60.

#### 4. Hasil Uji Asumsi Klasik

##### 4.1. Hasil Uji Normalitas Data

Berdasarkan hasil uji normalitas data dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dan dengan melihat uji grafik, maka dapat disimpulkan bahwa data mempunyai distribusi normal. Hal ini dapat dilihat dari nilai assym sig K-S yang lebih besar dari 0.05, maka dapat dinyatakan bahwa data mempunyai distribusi normal.

No	Variabel	Assym Sig K-S
1	Kesiapan Penerapan Standar	0,393

	Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua	
2	Sumber Daya Manusia	0,087
3	Komitmen Organisasi	0,123
4	Perangkat Pendukung	0,378

##### 4.2. Uji Multikolinearitas

Ringkasan hasil uji korelasi antara independent variabel untuk melihat apakah terjadi pelanggaran asumsi multikolinearitas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	Variabel	Tolerance	VIF
1	Sumber Daya Manusia	0,830	1,205
2	Komitmen Organisasi	0,965	1,036
3	Perangkat Pendukung	0,845	1,184

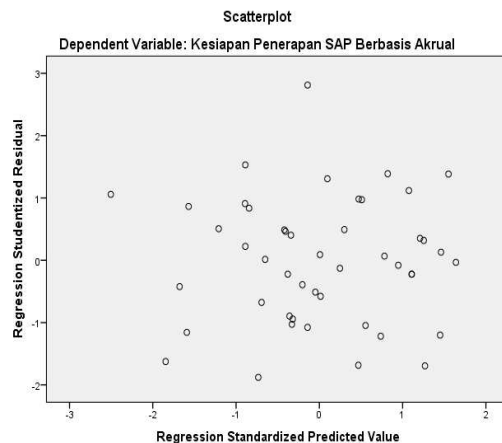
Berdasarkan hasil pengujian pada tabel diatas, karena nilai tolerance yang dihasilkan berkisar antara 0,1-1,0 dan nilai VIF untuk semua variabel memiliki nilai diantara 1-10, maka dapat disimpulkan tidak terdapat gejala multikolinearitas antar variabel independen.

##### 4.3 Uji Heteroskedastisitas

Pengujian asumsi heteroskedastisitas menyimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas. Dengan kata lain terjadi kesamaan varian dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Kesimpulan ini diperoleh dengan melihat penyebaran titik-titik yang menyebar secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas, serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hasil pengujian



heterokedastisitas dapat dilihat pada gambar berikut ini :



## 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,663 <sup>a</sup>	,440	,401	1,56480

a. Predictors: (Constant), Perangkat Pendukung, Komitmen Organisasi, Sumber Daya Manusia

b. Dependent Variable: Kesiapan Penerapan SAP Berbasis Akrua

Berdasarkan table diatas, diketahui nilai *Adjusted R<sup>2</sup>* sebesar 0,401. Artinya adalah bahwa sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 40,1%. Sedangkan sisanya 59,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi ini.

## 6. Analisis Regresi Berganda

### Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-,642	3,610		-,178	,860
Sumber Daya Manusia	,245	,085	,362	2,886	,006

Komitmen Organisasi	,060	,117	,059	,511	,612
Perangkat Pendukung	,319	,095	,417	3,357	,002

Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh model persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

$$Y = -0,642 + 0,245X_1 + 0,060X_2 + 0,319X_3 + e$$

## 7. Hasil Pengujian Hipotesis

### 7.1 Sumber Daya Manusia

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $2,886 > 2,018$  dan  $sig.t (0,006) < 0,05$  dengan demikian  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Menurut Wiley (2002, 3) dalam Azhar (2007) mendefinisikan bahwa "Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut". Sumber daya manusia merupakan elemen organisasi yang sangat penting, karenanya harus dipastikan sumber daya manusia ini harus dikelola sebaik mungkin akan mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.

### 7.2. Komitmen Organisasi

Dari tabel diatas di atas dapat dilihat bahwa  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $0,511 > 1,985$  dan  $sig.t (0,612) < 0,05$  dengan demikian  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Dari hasil pengujian tersebut, maka terdapat keputusan yaitu komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap kesiapan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Hal ini dimungkinkan terjadi, karena komitmen organisasi akan

mempunyai pengaruh pada saat penerapan SAP berbasis akrual yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2015. Sedangkan dalam hal faktor kesiapan penerapan SAP berbasis akrual tersebut, komitmen organisasi tidak berpengaruh secara signifikan. Hal ini didukung oleh penelitian Aldiani (2010) yang membuktikan bahwa komitmen organisasi berpengaruh pada keberhasilan penerapan PP No. 24 tahun 2005 pada Pemerintahan Kabupaten Labuan Batu.

### 7.3. Perangkat Pendukung

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $3,357 > 2,018$  dan  $sig.t (0,002) < 0,05$  dengan demikian  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Dari hasil pengujian tersebut, maka terdapat keputusan yaitu perangkat pendukung berpengaruh secara parsial kesiapan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.

Hasil penelitian ini sejalan dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Kenneth dan Jane (2005) bahwa Sistem akuntansi keuangan pemerintahan daerah agar berjalan secara efektif maka diperlukan sarana pendukung baik perangkat keras maupun perangkat lunak.

## SIMPULAN DAN SARAN

### 1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji sumber daya manusia, komitmen organisasi dan perangkat pendukung terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual di Pekanbaru. Berdasarkan hasil analisis dan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diperoleh simpulan sebagai berikut :

1. Hasil pengujian hipotesis pertama secara parsial membuktikan bahwa variable

sumber daya manusia berpengaruh terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual di Pekanbaru.

2. Hasil pengujian hipotesis kedua secara parsial membuktikan bahwa variable komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual di Pekanbaru.
3. Hasil pengujian hipotesis ketiga secara parsial membuktikan bahwa variable perangkat pendukung berpengaruh terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual di Pekanbaru.

### 2. Keterbatasan Penelitian

Karena penelitian ini menggunakan instrumen penelitian berupa kuisioner, sehingga masih ada kemungkinan kelemahan-kelemahan yang ditemui seperti jawaban yang kurang cermat, responden yang menjawab asal-asalan, tidak jujur, dan pertanyaan yang kurang lengkap atau kurang dipahami oleh responden serta peneliti yang tidak mengetahui apakah kuisioner benar-benar diisi oleh responden yang bersangkutan

### 3. Saran

Saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti bagi kesempurnaan penelitian selanjutnya yaitu :

1. Ruang lingkup penelitian ini hanya dilakukan pada Pemerintahan Kota Pekanbaru, sehingga untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum perlu dilakukan penelitian yang lebih luas.
2. Penelitian ini hanya menggunakan 3 (tiga) variable independen, yaitu

sumber daya manusia, komitmen organisasi dan perangkat pendukung. Oleh karena itu diharapkan pada penelitian selanjutnya yang ingin meneliti dengan topik yang sama agar dapat menambahkan variabel lain yang mungkin dapat mempengaruhi kesiapan penerapan SAP berbasis akrual, seperti variabel motivasi, budaya organisasi, regulasi serta komunikasi.

3. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber pembelajaran dan referensi bagi akademisi yang ingin mempelajari dan memahami tentang hal-hal yang mempengaruhi kesiapan penerapan SAP berbasis akrual.

#### Daftar Pustaka

- Ardiansyah, 2013. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesiapan Pemerintahan Daerah Dalam Implementasi PP 71 Tahun 2010*. Jurnal.
- Azhar, 2007. *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Keberhasilan Penerapan Permendagri 13 ( Studi pada pemerintah Kota Langsa)*. Tesis.
- Enho, Yohannes. 2008. *Pengaruh Pemahaman Sap, Pendidikan Dan Pelatihan, Serta Latar Belakang Pendidikan Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Medan*. Skripsi
- Faradillah, Andi. 2013. *Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010)*. Skripsi
- Ghulam, Rhumi. 2012. *Mencari Batu Pijakan Bagi Akrualisasi Sektor Publik Di Indonesia (Studi Atas Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Di Nepal, Hong Kong Dan Selandia Baru)*.
- Hardiansyah, 2013. *Sistem Administrasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik dalam Perspektif Otonomi Daerah*, Gave Media, Yogyakarta.
- Herlina, Hetty. 2010. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesiapan Pemerintahan Daerah Dalam Implementasi PP 71 Tahun 2010*. Jurnal
- Kusuma, Ririz Setiawati., 2013. *Analisis Kesiapan Pemerintah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual (Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Jember)*. Skripsi
- KSAP. 2010. *Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah*. Makalah disajikan dalam Seminar Pentahapan Implementasi SAP

- Akrual Pemda, Jakarta, 25 Maret.
- Mulyono. 2007. "Struktur Hardware Komputer", *Jurnal struktur Komputer*, Vol.3, No.1, Hal 6-7.
- Republik Indonesia, 2005. Peraturan Pemerintah Nomor/24/2005 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Republik Indonesia, 2010. Peraturan Pemerintah Nomor/71/2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Republik Indonesia, 2000. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang *Pengadaan Pegawai Negeri Sipil*
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*
- Siagian, Sondang P., 1994. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Sekaran, Uma. 2006. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Salemba Empat. Jakarta
- Sugiono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Jakarta
- Sulani, Aldiani., 2009. *Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan Penerapan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 Pada Pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu*. Skripsi
- Warisno, 2009. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi*. Tesis
- Witantri, Ajeng. 2012. *Faktor-faktor pendukung keberhasilan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Kota Medan*. Skripsi.
- Yafie, M.Dhairolly. 2013. *Penerapan Basis Akrual Pada Standar Akuntansi Pemerintahan Indonesia*. Jurnal.